

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202254028, 16 Agustus 2022

## Pencipta

Nama : **Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak dan Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si**

Alamat : Jln. Nusa Indah Gg. Nakula No.6 RT 01 RW 14, Dero, Condongcatur, Depok, Sleman, DI YOGYAKARTA, 55283

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak dan Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si**

Alamat : Jln. Nusa Indah Gg. Nakula No.6 RT 01 RW 14, Dero, Condongcatur, Depok, Sleman, DI YOGYAKARTA, 55283

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Strategi Efektif Untuk Mencegah Suap Pada Lembaga Sektor Publik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 November 2021, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000369761

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



### PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN TUNGGAL

ID Proposal: 935101c2-5932-41e5-802a-8be043e49921  
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-1 dari 1 tahun

### 1. IDENTITAS PENELITIAN

#### A. JUDUL PENELITIAN

STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENCEGAH SUAP PADA LEMBAGA SEKTOR PUBLIK

#### B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	Ekonomi dan sumber daya manusia	Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri	Akuntansi

#### C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dosen Pemula	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	3	1

### 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
BRIYAN EFFLIN SYAHPUTRA Ketua Pengusul	Universitas Teknologi Yogyakarta	Akuntansi		6696249	0
ANGGIT ESTI IRAWATI S.E, M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Teknologi Yogyakarta	Akuntansi	Membantu ketua peneliti dalam menyusun dan menjalankan rencana penelitian dan rencana keuangan, dan membantu menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir serta membantu ketua peneliti dalam menyusun artikel untuk publikasi	6696544	0

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

#### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

##### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
1	Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6	Accepted	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia; atau Jurnal Imiah Akuntansi dan Bisnis

##### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
1	Artikel di jurnal internasional	Accepted	Asian Review of Accounting; atau Journal of Financial Reporting and Accounting; atau Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance

#### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

**Total RAB 1 Tahun Rp. 19,950,000**

**Tahun 1 Total Rp. 19,950,000**

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Kertas HVS, Materai, Fotokopi, Catridge Tinta (Hitam dan Warna), Whiteboard, Alat Tulis (Ballpoint dan Spidol), Jilid Dokumen, Notebook, Paper Clip	Paket	1	1,250,000	1,250,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Souvenir untuk Responden	Unit	250	14,000	3,500,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	Honorarium Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	300,000	600,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	Honorarium Petugas Penyebar Kuesioner	OR	250	8,000	2,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Biaya Konsumsi Rapat/Diskusi	OH	30	30,000	900,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	Honorarium Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	300,000	600,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Honorarium Pengolah Data	Penelitian	1	1,500,000	1,500,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	Konsultasi dengan Pakar/Expert	OJ	2	1,000,000	2,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	Konsumsi Rapat/Diskusi	OH	25	30,000	750,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	Honorarium Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	300,000	600,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	Konsumsi Rapat/Diskusi	OH	25	30,000	750,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Biaya publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Biaya Publikasi pada jurnal internasional	Paket	1	3,500,000	3,500,000

## 6. HASIL PENELITIAN

**A. RINGKASAN:** Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Menerapkan strategi pencegahan suap yang efektif merupakan langkah yang tepat bagi lembaga sektor publik yang berkomitmen untuk memerangi dan menurunkan angka kasus suap kedepannya. Mengingat kasus suap merupakan salah satu jenis kasus korupsi yang paling banyak terjadi setiap tahunnya pada lembaga sektor publik di berbagai negara, termasuk salah satunya ialah Indonesia. Sehingga pencarian mengenai berbagai faktor yang dapat mendukung proses pencegahan tindakan suap masih menjadi hal yang diutamakan oleh banyak pihak. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh big data, whistle-blowing system dan spiritualitas terhadap pencegahan suap. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi terbaru bagi pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menjalankan strategi yang efektif dan komprehensif dalam rangka mencegah terjadinya kasus suap kedepannya. Sehingga harapannya kasus suap yang terjadi di pemerintah Indonesia dapat diminimalisir jumlahnya. Tentunya hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi utama bagi para peneliti/akademisi yang tertarik mengenai strategi yang efektif untuk mencegah tindakan suap.

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner (metode survei) pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta auditor internal yang bekerja di Kantor Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Pengujian statistik dari hasil penyebaran kuesioner dari penelitian ini berupa structural equation modelling (SEM), yang dibantu oleh aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa baik big data, whistle-blowing maupun spiritualitas terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap.

Luaran wajib yang ditargetkan dalam penelitian ini yaitu "accepted" pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA) peringkat 1-6. Adapun artikel dari penelitian ini (luaran wajib) telah di "submit" pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha (Jurnal Nasional Terakreditasi/SINTA peringkat 2). Ditargetkan artikel penelitian ini dapat segera "Accepted" pada Bulan Desember 2021 mendatang. Sedangkan untuk luaran tambahan dari penelitian ini telah diganti dengan mendaftarkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas poster dari penelitian ini. Pada tanggal 17 November 2021, poster penelitian ini dinyatakan telah diterima/telah terbit HKI-nya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun TKT akhir yang ditargetkan dalam penelitian ini ialah TKT 3.

**B. KATA KUNCI:** Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

big data; whistle-blowing; spiritualitas; suap

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner penelitian. Adapun kuesioner penelitian ini telah disebarkan kepada responden yang telah dituju. Adapun responden yang dimaksud ialah auditor-auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Indonesia. Proses penyebaran kuesioner telah dilaksanakan sejak Bulan Februari 2021. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, didapati jumlah kuesioner yang telah diisi dan kemudian layak untuk diolah yaitu sebanyak 191 kuesioner, yang berasal dari auditor yang bekerja di BPK, BPKP dan Inspektorat dari berbagai Provinsi di Indonesia.

### 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, telah disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Pencegahan Suap	Pencegahan tindakan yang dilakukan seseorang/pihak dalam memberikan sesuatu yang berharga kepada pihak (penerima suap), yang dapat memberikan keuntungan atau kemudahan tertentu kepada pemberi suap melalui penyalagunaan jabatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh penerima suap	6 item	[1]
<i>Big Data</i>	Kumpulan data besar yang dalam pengelolaannya membutuhkan teknologi yang canggih, dengan karakteristik berupa <i>volume</i> , <i>value</i> , <i>variety</i> , <i>veracity</i> , dan <i>velocity</i>	4 item	[2]
<i>Whistle-blowing System</i>	Wadah yang menerima pelaporan yang dilaporkan seseorang yang melihat secara langsung suatu tindakan <i>fraud</i> ataupun tindakan ilegal lainnya yang terjadi di suatu organisasi	8 item	[3] [4] [5]
Spiritualitas	Rasa percaya dan keimanan sepenuhnya dalam hubungan seseorang individu terhadap Tuhan, sehingga individu tersebut senantiasa untuk berperilaku benar yang tidak melanggar etika dan norma yang berlaku	6 item	[6] [7]

Kuesioner penelitian ini, terdiri atas 24 pertanyaan, dengan rincian 6 pertanyaan untuk variabel pencegahan suap, 4 pertanyaan untuk variabel *big data*, 8 pertanyaan untuk variabel *whistle-blowing*, dan 6 pertanyaan untuk variabel spiritualitas. Semua indikator dari setiap pertanyaan kuesioner penelitian ini, telah diukur menggunakan skala *likert* dengan interval 1-6, dengan pertanyaan untuk skala 1-3 menunjukkan persepsi yang tidak setuju. Sebaliknya, untuk skala 4-6 menunjukkan skala persepsi yang setuju.

### 2. Hasil Pengumpulan Data

Kuesioner penelitian ini telah disebarkan kepada auditor-auditor yang bekerja di BPK, BPKP dan Inspektorat dari berbagai Provinsi di Indonesia, dan berdasarkan hasil penyebaran yang telah dilakukan, total sebanyak 191 kuesioner penelitian, yang kemudian layak untuk diolah. Adapun rinciannya mengenai hasil pengumpulan datanya, akan disajikan pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

**Tabel 2.** Klasifikasi Responden Berdasarkan Asal Institusi

Asal Institusi	Jumlah	Presentase
Badan Pemeriksa Keuangan	151	79%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	26	14%
Inspektorat	14	7%
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 2 di atas, disimpulkan bahwa mayoritas responden dari penelitian ini, berasal dari auditor yang bekerja di BPK, dengan jumlah responden sebanyak 151 orang atau sebanyak 79%. Sedangkan sisanya, berasal dari auditor yang bekerja di BPKP sebanyak 26 orang (14%) dan auditor yang bekerja di Inspektorat sebanyak 14 orang (7%). Selanjutnya pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5, akan disajikan secara rinci responden berdasarkan kantor perwakilannya, yang diklasifikasikan sesuai dengan asal intitusi.

**Tabel 3.** Klasifikasi Responden BPK Berdasarkan Asal Provinsi (Kantor Perwakilan)

Lokasi Kantor Perwakilan BPK	Jumlah	Presentase
Daerah Istimewa Yogyakarta	6	4%
DKI Jakarta	1	1%
Jambi	4	3%
Jawa Barat	39	26%
Jawa Tengah	8	5%
Jawa Timur	11	7%
Kalimantan Barat	1	1%
Kalimantan Tengah	1	1%
Kalimantan Timur	18	12%
Kepulauan Riau	1	1%
Papua	1	1%
Papua Barat	7	5%
Riau	1	1%
Sumatera Barat	27	18%
Sumatera Selatan	23	15%
Sumatera Utara	2	1%
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>

**Tabel 4.** Klasifikasi Responden BPKP Berdasarkan Asal Provinsi (Kantor Perwakilan)

Lokasi Kantor Perwakilan BPKP	Jumlah	Presentase
Aceh	1	4%
DKI Jakarta	7	27%
Jawa Barat	1	4%
Kalimantan Tengah	2	8%
Lampung	3	12%
Nusa Tenggara Barat	1	4%
Riau	11	42%
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

**Tabel 5.** Klasifikasi Responden Inspektorat Berdasarkan Asal Provinsi

Lokasi Kantor Inspektorat	Jumlah	Presentase
Jawa Tengah	3	21%
Daerah Istimewa Yogyakarta	10	71%
Sumatera Selatan	1	7%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari 19 Provinsi, dengan responden terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat.

### 3. Deskripsi Responden

Berikut akan disajikan data detail mengenai responden dari penelitian ini. Deskripsi akan dijelaskan berdasarkan beberapa pengelompokkan, seperti berdasarkan gender (jenis kelamin), tingkat pendidikan, pengalaman kerja responden sebagai auditor, dan kelompok usia. Secara ringkas informasi deskripsi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Demografi Responden Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	<b>Gender</b>		
	Pria	109	57%
	Wanita	82	43%
2	<b>Tingkat Pendidikan</b>		
	Diploma atau yang sederajat	1	1%
	Sarjana atau yang sederajat	136	71%
	Master/Magister atau yang sederajat	54	28%
3	<b>Pengalaman Kerja sebagai Auditor</b>		
	Kurang dari 1 tahun	3	2%
	1 tahun s/d 3 tahun	34	18%
	Lebih dari 3 tahun s/d 6 tahun	29	15%
	Lebih dari 6 tahun	125	65%
4	<b>Kelompok Usia</b>		
	20+ s/d 30 tahun	40	21%
	30+ s/d 40 tahun	86	45%
	40+ s/d 50 tahun	43	22%
	50+ s/d 60 tahun	22	12%

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat responden penelitian ini, telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jika dilihat berdasarkan gender/jenis kelamin, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dari penelitian ini merupakan auditor dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 109 responden dengan presentase sebesar 57%. Sedangkan sisanya, sebanyak 82 responden (sebesar 43%), merupakan auditor dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian apabila dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden dari penelitian ini merupakan auditor dengan tingkat pendidikan Sarjana atau yang sederajat, yaitu sebanyak 136 responden (71%). Sisanya sebanyak 54 responden (28%) merupakan auditor dengan tingkat pendidikan Master/Magister atau yang sederajat dan sebanyak 1 orang responden (1%) merupakan auditor dengan tingkat pendidikan Diploma atau yang sederajat.

Apabila dilihat berdasarkan pengalaman kerja sebagai auditor, mayoritas responden dalam penelitian ini, merupakan auditor yang memiliki pengalaman kerja sebagai auditor lebih dari 6 tahun, yaitu sebanyak 125 responden dengan presentase sebesar 65%. Selain itu, jika dilihat dari kelompok usia, mayoritas responden dari penelitian ini merupakan auditor yang berada di kelompok umur antara lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu sebanyak 86 responden (45%).

### 4. Hasil Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara simultan, menggunakan *partial least square* (PLS) dengan alat statistik berupa *smartPLS*. Sehingga analisis datanya akan dilakukan melalui 2 sub model evaluasi yaitu *outer model* dan *inner model*. Pada *outer model* akan terdapat 2 tahapan pengujian yaitu uji validitas (baik uji validitas konvergen maupun uji validitas diskriminan) dan uji reliabilitas [8]. Sedangkan pada uji *inner model* akan terdapat beberapa tahap pengujian/penilaian yaitu berupa penilaian terhadap nilai *r-square*, *path coefficient* dan uji signifikansi [9].



Dalam pengujian validitas, akan terdapat 2 jenis pengujian yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Suatu penelitian akan dikatakan memenuhi syarat uji validitas konvergen, apabila memiliki nilai *loading* untuk masing-masing item pertanyaan kuesioner dan nilai *average variance expected* (AVE) lebih dari 0.5 [10]. Apabila setelah pengujian, masih terdapat nilai *loading* pada item tertentu yang memiliki nilai dibawah 0.5, maka nilai *loading* pada item tersebut harus segera di *drop*. Hal ini perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi nilai AVE-nya [9]. Setelah pengujian validitas konvergen selesai dilakukan, maka selanjutnya ialah pengujian validitas diskriminan. Syarat agar pengujian ini terepenuhi, apabila nilai pangkat dua/akar dari AVE dari suatu variabel dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang lebih tinggi/besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya dalam penelitian tersebut [11]. Setelah semua pengujian validitas selesai dilakukan, maka pengujian terakhir dalam *outer model* ialah uji reliabilitas. Untuk memenuhi syarat uji reliabilitas, maka setiap variabel dalam suatu penelitian harus memiliki nilai *composite reliability* (CR) lebih besar dari 0.7 [9]. Adapun berikut, hasil pengujian validitas maupun reliabilitas akan disajikan pada Tabel 7, Tabel 8 dan Tabel 9.

**Tabel 7.** Nilai *Loading* dan Nilai AVE

No	Variabel	Item	Nilai <i>Loading</i>	AVE
1	<i>Big Data</i> (BD) – Variabel Independen	BD 1	0,7484	0,5205
		BD 2	0,6690	
		BD 3	0,7284	
		BD 4	0,7373	
2	<i>Whistle-Blowing</i> (WB) – Variabel Independen	WB 1	0,7848	0,6614
		WB 2	0,9089	
		WB 3	0,9235	
		WB 4	0,8399	
		WB 5	0,6590	
		WB 6	0,6075	
		WB 7	0,8498	
		WB 8	0,8751	
3	Spiritualitas (SP) – Variabel Independen	SP 1	0,7078	0,6799
		SP 2	0,8748	
		SP 3	0,8697	
		SP 5	0,8359	
		SP 6	0,8235	
4	Pencegahan Suap (PS) – Variabel Dependen	PS 1	0,7383	0,6799
		PS 3	0,8276	
		PS 4	0,8810	
		PS 5	0,5661	
		PS 6	0,8770	

Pada Tabel 7, dapat dilihat masih terdapat item yang memiliki nilai *loading* kurang dari 0.5, yaitu item SP 4 (variabel spiritualitas), dan item PS 2 (variabel pencegahan suap). Maka dari itu, kedua item tersebut harus di *drop*, karena apabila tidak di *drop* akan mempengaruhi nilai AVE. Sehingga, semua nilai *loading* yang kemudian disajikan pada Tabel 7, merupakan item pada setiap variabel yang memiliki nilai di atas 0.5, setelah dilakukannya *drop* pada 2 item sebelumnya. Selain itu, pada Tabel 7 dapat dilihat juga bahwa nilai AVE pada setiap variabel memiliki nilai di atas 0.5. Maka, apabila dilihat secara keseluruhan pada Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas konvergen. Selanjutnya disajikan Tabel 8, yang berisikan hasil pengujian validitas diskriminan.

**Tabel 8.** Nilai Korelasi Antar Variabel Penelitian

Variabel	BD	PS	SP	WB
<i>Big Data</i> (BD)	<b>0,7215</b>	0,0000	0,0000	0,0000
Pencegahan Suap (PS)	0,4837	<b>0,7869</b>	0,0000	0,0000
Spiritualitas (SP)	0,4580	0,6764	<b>0,8246</b>	0,0000
<i>Whistle-Blowing</i> (WB)	0,4843	0,7781	0,7100	<b>0,8133</b>

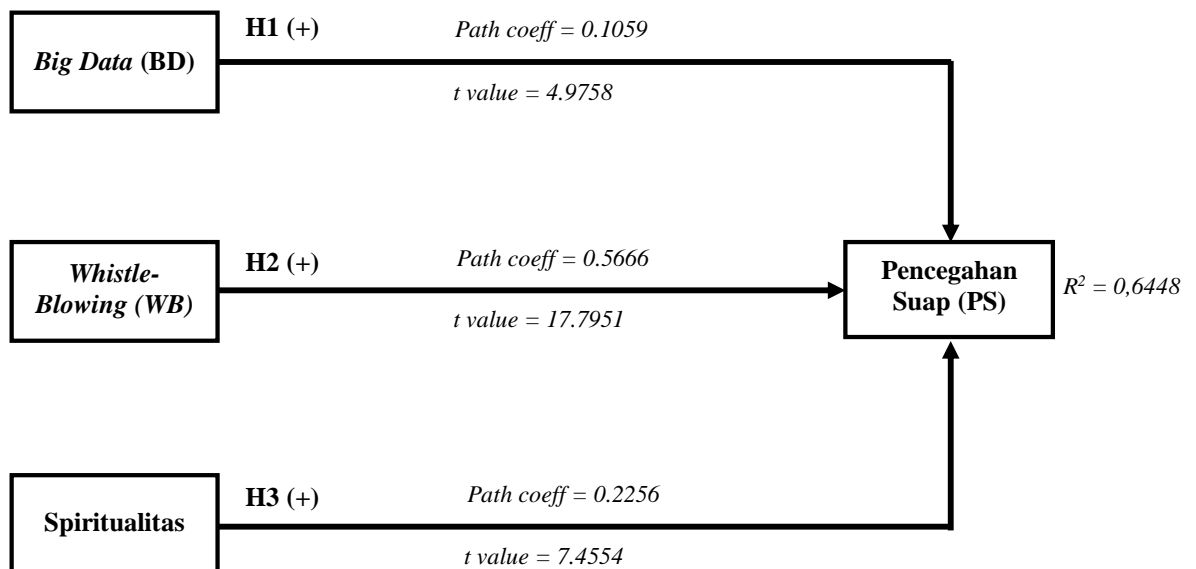
*Catatan:* angka cetak tebal diagonal, merupakan nilai akar/pangkat dua dari AVE

Pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai korelasi dari setiap variabel dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang tertinggi, jika dibandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas diskriminan. Apabila merujuk pada Tabel 7 dan Tabel 8, maka disimpulkan secara keseluruhan penelitian ini telah memenuhi syarat pengujian validitas. Setelah pengujian validitas dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah pengujian reliabilitas. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Nilai *Composite Reliability* (CR)

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
<i>Big Data</i> (BD)	0,8125
<i>Whistle-Blowing</i> (WB)	0,9388
Spiritualitas (SP)	0,9135
Pencegahan Suap (PS)	0,8882

Pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa semua variabel penelitian ini (baik variabel independen maupun dependen) memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0.7. Sehingga, disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat pengujian reliabilitas. Berdasarkan Tabel 7, Tabel 8 dan Tabel 9, telah diketahui bahwa semua tahapan *outer model* telah dilakukan dalam penelitian ini. Maka, setelah tahapan *outer model* telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya ialah uji *inner model*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada *inner model* akan terdapat proses penilaian *r-square*, *path coefficient* dan uji signifikansi. Perlu diketahui bahwa, penelitian ini akan menggunakan alpha 5%, sehingga suatu hipotesis dalam penelitian akan dikatakan terbukti signifikan apabila memiliki nilai *t value* di atas 1.96 [9]. Adapun hasil pengujian *inner model* dalam penelitian ini, secara ringkas dan detail dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Hasil Evaluasi *Inner Model*

Pada Gambar 1, telah disajikan secara detail mengenai hasil evaluasi *inner model* dari penelitian ini. Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki nilai *r-square* sebesar 0.6448 atau sebesar 64.48%. Hal tersebut memiliki arti bahwa, variabel dependen penelitian ini yaitu pencegahan suap,

telah dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (variabel *big data*, *whistle-blowing* dan spiritualitas) sebesar 64.48%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 35.52% dipengaruhi oleh variabel-variabel potensial lainnya.

Tahapan selanjutnya setelah uji *r-square* dilakukan ialah uji signifikansi. Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa semua hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini telah terbukti/ telah didukung oleh data. Hal ini dikarenakan, setiap hipotesis yang dibangun, telah terbukti memiliki nilai *path coefficient* yang positif, dan semuanya memiliki nilai *t-value* di atas 1.96. Artinya dapat disimpulkan bahwa: (a) *Big data* telah terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap; (b) *Whistle-blowing* telah terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap; dan (c) Kecerdasan spiritualitas telah terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap. Hasil dari penelitian ini diketahui selaras dengan hasil beberapa penelitian terdahulu [12, 13, 14, 15, 16]. Adapun berikut akan disajikan dalam Tabel 10 mengenai ringkasan mengenai hasil dari penelitian ini.

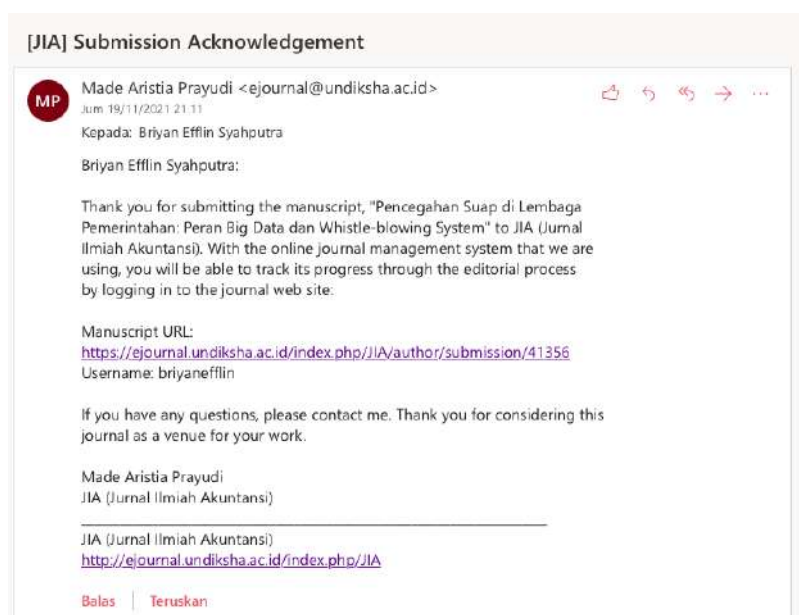
**Tabel 10.** Hasil Penelitian

Hipotesis	<i>Path Coefficient</i>	<i>t-value</i>	Kesimpulan
H1. <i>Big data</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.1059 (positif)	4.9758 (lebih besar dari 1.96)	Didukung
H2. <i>Whistle-blowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.5666 (positif)	17.7951 (lebih besar dari 1.96)	Didukung
H3. Kecerdasan spiritualitas berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.2256 (positif)	7.4554 (lebih besar dari 1.96)	Didukung

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

### 1. Luaran Wajib

Hasil dari penelitian ini tentunya akan dipublikasikan. Hal ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan target yang disampaikan sebelumnya, hasil dari penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6. Pada tanggal 19 November 2021, **peneliti telah melakukan submit** artikel penelitian yang akan dipublikasikan (luaran wajib). Artikel penelitian ini telah disubmit pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha (Jurnal Nasional Terakreditasi/SINTA 2)



**Gambar 2.** Bukti Submit Artikel Penelitian di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)



Gambar 3. Bukti Submit Artikel Penelitian di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)

## 2. Luaran Tambahan

Peneliti akhirnya memutuskan untuk menambahkan luaran tambahan atas pelaksanaan penelitian ini berupa pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas poster dari penelitian ini, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran HKI atas poster penelitian ini, telah didaftarkan sejak tanggal 17 November 2021, dan pada tanggal yang sama, pendaftaran permohonan HKI atas poster penelitian ini telah **disetujui/diterima** oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti penerimaan/sertifikat pencatatan ciptaannya dapat dilihat pada Gambar 3.



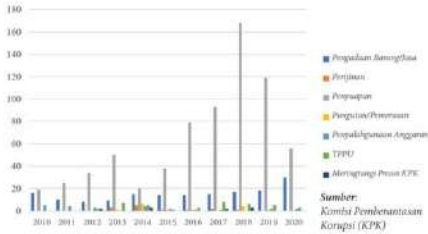
Gambar 3. Surat Pencatatan Ciptaan (HKI) atas Poster Penelitian ini

# PENCEGAHAN SUAP PADA LEMBAGA SEKTOR PUBLIK INDONESIA

Briyan Eflin Syahputra, S.E., M.Ak (NIDN: 0514049401) | Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si (NIDN: 0530089401)  
 PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

## 1. LATAR BELAKANG

Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 10 Tahun Terakhir (2010-2020)



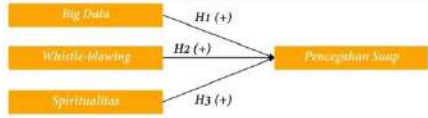
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat masih tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan kasus suap yang ternyata, masih mendominasi sebagai tindakan korupsi dengan jumlah kasus tertinggi disetiap tahunnya. Kondisi semakin diperparah, dengan tingginya nilai kerugian yang diderita oleh negara atas tindakan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2020 saja, negara Indonesia diketahui telah menderita kerugian atas tindakan korupsi mencapai Rp 56,7 Triliun. Selain itu, pada tahun yang sama, jumlah kerugian atas tindakan suap diketahui mencapai Rp322,2 miliar.

Tingginya kasus tersebut, tentunya akan mendorong berbagai pihak untuk mencari berbagai strategi ataupun metode yang dapat menjadi solusi, agar kedepannya kasus suap dapat dicegah. Sehingga diketahui bahwa, Big Data, Whistle-blowing System, dan Spiritualitas dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindakan suap tersebut kedepannya, terutama pada lembaga sektor publik. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai lembaga sektor publik di Indonesia kedepannya, dalam rangka untuk mencegah terjadinya fraud, khususnya ialah tindakan suap.

## 2. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk menganalisis pengaruh big data terhadap pencegahan suap
- Untuk menganalisis pengaruh whistle-blowing terhadap pencegahan suap
- Untuk menganalisis pengaruh spiritualitas terhadap pencegahan suap

## 3. MODEL PENELITIAN



## 4. METODE PENELITIAN

- **Metodologi:** Pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
- **Responden:** 151 auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 26 auditor yang bekerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), dan 14 auditor yang bekerja di Inspektorat.
- **Teknik Pengumpulan Data:** Menggunakan kuesioner dengan skala likert pada interval 1-6 (terdapat 24 item pertanyaan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling.
- **Metode Analisis Data:** Analisis data dilakukan dengan pendekatan uji statistik berupa Struktural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS

## 5. HASIL PENELITIAN

Semu hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti atau telah didukung oleh data. Hal ini dikarenakan semua hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, memiliki nilai path coefficient yang positif dan memiliki nilai t value yang lebih besar dari 1.96 (significance level 5%).

Hipotesis	Path Coefficient	t-value	Kesimpulan
H1. Big data berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.1059 (positif)	4.9758 (lebih besar dari 1.96)	Didukung
H2. Whistle-blowing berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.5666 (positif)	17.7951 (lebih besar dari 1.96)	Didukung
H3. Spiritualitas berpengaruh positif terhadap pencegahan suap	0.2256 (positif)	7.4554 (lebih besar dari 1.96)	Didukung

Nb: T-Value 1.96 (significance level 5%)

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Big data terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap
- Whistle-blowing terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap
- Spiritualitas terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap

## 7. IMPLIKASI

- Berbagai lembaga sektor publik di Indonesia dapat menjadikan hasil dari penelitian ini, sebagai referensi terkait upaya untuk mencegah tindakan suap kedepannya.
- Menambah literatur dalam bidang audit khususnya mengenai pencegahan suap di lembaga sektor publik

## 8. SARAN

- Kedepannya, tetap melanjutkan penelitian mengenai pencegahan suap baik di lembaga sektor publik maupun non sektor publik.
- Peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa, dapat menambahkan variabel potensial lainnya terkait pencegahan suap, seperti religiusitas.

Dibiayai oleh:  
 Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor 066/E4.1/AK.04.PT/2021, tanggal 12 Juli 2021

Gambar 4. Poster Penelitian yang telah terdaftar HKI-nya

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

.....

.....

.....

.....

.....

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala utama atas pelaksanaan penelitian ini ialah terkait dengan penyebaran kuesioner penelitian ini. Hal ini dikarenakan proses penyebaran kuesioner penelitian ini, masih dilaksanakan pada masa pandemi *covid-19*, terlebih per bulan Juli 2021 kemarin terdapat kebijakan PPKM dari Pemerintah Pusat dalam rangka menanggulangi penyebaran virus *covid-19* yang selalu mengalami peningkatan. Sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan penyebaran kuesioner secara langsung di lokasi institusi responden. Mengingat cakupan responden dari penelitian ini tidak hanya berlokasi di Yogyakarta, namun ditargetkan di seluruh Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil pengumpulan data, hanya terdapat 191 kuesioner saja yang layak untuk diolah.

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan submit atas artikel penelitian ini (luaran wajib). Artikel penelitian ini diketahui telah di submit oleh peneliti pada tanggal 19 November 2021 di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Harapannya artikel tersebut dapat segera *accepted* dan *published* dalam waktu dekat ini. Ditargetkan artikel penelitian yang telah di submit tersebut dapat segera *accepted* pada Bulan Desember 2021. Selain itu, untuk luaran tambahan, penelitian ini telah menghasilkan poster penelitian, yang HKI-nya sudah terdaftar dan diterima oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 November 2021.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] A. N. Sow, R. Basiruddin, J. Mohammad, and S. Z. A. Rasid, "Fraud Prevention in Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs)," *J. Financ. Crime*, vol. 25, no. 2, pp. 499–517, 2018, doi: 10.1108/JFC-05-2017-0049.
- [2] Z. Rezaee and J. Wang, "Relevance of Big Data to Forensic Accounting Practice and Education," *Manag. Audit. J.*, vol. 34, no. 3, pp. 268–288, 2019.
- [3] N. R. A. M. Noor and N. Mansor, "Exploring the Adaptation of Artificial Intelligence in Whistleblowing Practice of the Internal Auditors in Malaysia," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 163, pp. 434–439, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.12.126.
- [4] J. B. Suh and H. S. Shim, "The Effect of Ethical Corporate Culture on Anti-Fraud Strategies in South Korean Financial Companies: Mediation of Whistleblowing and A Sectoral Comparison Approach in Depository Institutions," *Int. J. Law, Crime Justice*, vol. 60, pp. 1–12, 2020.
- [5] A. R. Sihotang, "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud pada Universitas Sriwijaya," Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018.
- [6] N. Parsian and T. Dunning, "Developing and Validating a Questionnaire to Measure Spirituality : A Psychometric Process," *Glob. J. Health Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 2–11, 2009.
- [7] J. Hardt, S. Schultz, C. Xander, G. Becker, and M. Dragan, "The Spirituality Questionnaire: Core Dimensions of Spirituality," *Psychology*, vol. 03, no. 01, pp. 116–122, 2012, doi: 10.4236/psych.2012.31017.
- [8] S. Velayutham, J. M. Aldridge, and B. Fraser, "Gender Differences in Student Motivation and Self-regulation in Science Learning: A Multi-group Structural Equation Modeling Analysis," *Int. J. Sci. Math. Educ.*, vol. 10, no. 6, pp. 1347–1368, 2012.

- [9] H. Latan and I. Ghozali, *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- [10] W. W. Chin, "Issues and Opinion on Structural Equation Modeling," *MIS Q.*, vol. 22, no. 1, pp. 7–16, 1998.
- [11] C. Fornell and D. F. Larcker, "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error," *J. Mark. Res.*, vol. 18, no. 1, pp. 39–50, 1981.
- [12] J. Chen, Y. Tao, H. Wang, and T. Chen, "Big Data Based Fraud Risk Management at Alibaba," *J. Financ. Data Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2015.
- [13] Ernst & Young, *Global EY FIDS Forensic Data Analytics Survey 2014: Big Risks Require Big Data Thinking*. 2014 EYGM Limited, SCORE no. DQ0037, 2014.
- [14] F. M. Teichmann and M. C. Falker, "Whistleblowing Incentives," *J. Financ. Crime*, vol. 28, no. 2, pp. 394–405, 2020.
- [15] S. Yakubu and M. K. Dikwa, "Combatting Economic Crimes in Nigeria Through Whistleblowing: A Shift From Policy to Legal Framework," *J. Money Laund. Control*, vol. 23, no. 4, pp. 819–832, 2020.
- [16] P. Purnamasari and I. Amaliah, "Fraud Prevention: Relevanse to Religiosity and Spirituality in The Workplace," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 211, pp. 827–835, 2015.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6

Target: Accepted

Dicapai: Submitted

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti submit

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti submit

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap





# Pencegahan Suap di Lembaga Pemerintahan: Peran *Big Data* dan *Whistle-blowing System*

Briyan Efflin Syahputra\*, dan Anggit Esti Irawati

Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Jl. Siliwangi (Ringroad  
Utara) Jombor, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

\*(briyan.efflin@staff.uty.ac.id)

---

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:

Tanggal diterima:

Tanggal dipublikasi daring:

**Kata kunci:** *big data; whistle-blowing system; suap*

## Pengutipan:

Syahputra, Briyan Efflin & Irawati, Anggit Esti. (Tahun publikasi). Pencegahan Suap di Lembaga Pemerintahan: Peran *Big Data* dan *Whistle-blowing System*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. (No.), Hal.

**Keywords:** *big data; whistle-blowing system; bribery*

## ABSTRAK

Suap telah menjadi salah satu jenis tindakan korupsi dengan jumlah kasus tertinggi disetiap tahunnya. Sehingga, pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masih perlu dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini harus dilakukan. Tujuannya ialah untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari variabel *big data* dan *whistle-blowing system* terhadap pencegahan suap. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan ialah survei, dengan menyebarkan kuesioner kepada 191 auditor yang diketahui bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Indonesia. Adapun pengujian statistik penelitian ini berupa *structural equation modelling* (SEM), yang dibantu menggunakan aplikasi smartPLS. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa, baik *big data* maupun *whistle-blowing system* telah terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap.

## ABSTRACT

*Bribery was an act of corruption with the highest number of cases every year. Therefore, it was necessary to find a solution to solve this problem. This research investigated the influence of big data and whistle-blowing system on bribery prevention. This research used quantitative approach by survey using questionnaire. The respondents in this research were 191 auditors who worked at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, and Inspektorat of Indonesia. The statistical test in this research was the structural equation modelling (SEM) of SmartPLS application. The result showed big data and whistle-blowing system had significant and positive influence on bribery prevention.*

## PENDAHULUAN

Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat kasus korupsi yang cukup tinggi. Bahkan, hampir di setiap tahunnya jumlah kasus korupsi yang terjadi selalu mengalami peningkatan, terutama kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pemerintahan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2019 saja setidaknya telah terjadi 217 kasus korupsi, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun (Kompas, 2020). Kondisi kemudian semakin diperparah, dikarenakan ICW kembali melaporkan bahwa, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi yang cukup signifikan di Indonesia. Setidaknya pada tahun 2020, terdapat 1.218 perkara korupsi yang telah disidangkan, dengan total terdakwa mencapai 1.298 orang. Aparatur sipil negara dan perangkat desa, diketahui merupakan jumlah pelaku terbanyak atas tindakan tersebut (Kompas, 2021a). Selain itu diketahui juga bahwa, pada tahun 2020, negara tercatat telah mengalami kerugian mencapai Rp56,7 Triliun atas kasus tersebut. Jumlah tersebut meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tersebut, ternyata

masih didominasi oleh tindakan suap. Diketahui pada 10 tahun terakhir (2010-2020), suap masih menjadi salah jenis tindakan korupsi dengan jumlah kasus tertinggi disetiap tahunnya (KPK, 2021). Bahkan, berdasarkan data yang disampaikan oleh ICW, setidaknya pada tahun 2020, negara telah mengalami kerugian mencapai Rp322,2 miliar, akibat dari tindakan suap saja (Kompas, 2021b).

Berdasarkan berbagai data yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dilihat parahnya kasus korupsi (utamanya suap) yang telah terjadi di Indonesia, terutama di lembaga Pemerintahan. Tentu hal ini sangat memprihatinkan, hingga kemudian akan banyak pihak yang akan semakin terdorong, untuk menemukan suatu strategi maupun metode, yang memang terbukti efektif mencegah terjadinya kasus tersebut. Menurut Hipgrave (2013), *big data* akan menjadi solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan, melalui teknologi *big data*, diketahui bahwa proses identifikasi tanda-tanda akan terjadinya aktivitas *fraud* termasuk suap, akan menjadi lebih cepat untuk dideteksi. Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh suatu instansi, untuk menghentikan kemungkinan terjadinya *fraud* tersebut. Lebih lanjut

Hipgrave (2013) juga menjelaskan bahwa, *big data* akan dengan mudah untuk menganalisis tren dan pola terjadinya *fraud*, berdasarkan jejak historis data-data terdahulu (baik data terstruktur maupun tidak terstruktur), yang kemudian informasi tersebut, dapat dimanfaatkan oleh instansi, sebagai *input* untuk menyusun strategi agar kasus *fraud* serupa tidak terjadi kembali (Sow et al., 2018; dan Hartono, 2019) Sehingga hal ini akan menjadikan *big data* menjadi sangat efektif untuk mencegah terjadinya suap di suatu instansi. Alibaba ialah salah satu perusahaan besar dunia, yang juga telah membuktikan keefektifan dari *big data*, dalam rangka untuk mencegah terjadinya *fraud* pada perusahaan tersebut (Chen et al., 2015).

Selain *big data*, *whistle-blowing system* juga diyakini sebagai salah satu faktor yang efektif dapat mencegah terjadinya suap (Suh & Shim, 2020; dan Johansson & Carey, 2016). Hal ini turut didukung oleh Francis & Armstrong (2011); dan Al-Haidar (2018), yang menyatakan bahwa *whistle-blowing system*, dapat menjadi mekanisme *anti-corruption* yang sangat efektif. Hal ini sangat memungkinkan, karena dengan diaplikasinya *whistle-blowing system* di suatu instansi, maka para *whistle-*

*blower* akan memiliki wadah yang legal, yang dapat menampung setiap aduan atas tindakan suap yang dilihatnya, termasuk pelaporan atas tindakan yang mengindikasikan akan terjadinya suap (sebelum tindakannya dilakukan). Tentunya, informasi dari *whistle-blower* ini, nantinya dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi suatu instansi, untuk dapat menyusun berbagai upaya dan strategi pencegahan suap. Selain itu, dengan adanya *whistle-blowing system* di suatu instansi, ternyata dapat memberikan efek rasa takut dan enggan bagi para pelaku, untuk melakukan tindakan suap.

Hingga saat ini, memang sudah ada beberapa penelitian sebelumnya, yang juga telah meneliti mengenai bagaimana pengaruh variabel *big data* terhadap pendeteksian *fraud*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tang & Karim, (2019). Namun, penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh hubungan *big data* terhadap pencegahan *fraud*, terutama terhadap pencegahan suap, masih tergolong sangat jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Padahal, dengan melihat potensinya, *big data* tentunya tidak hanya efektif untuk digunakan dalam rangka mendeteksi *fraud*, namun juga akan sangat efektif jika digunakan dengan tujuan untuk mencegah tindakan *fraud* (termasuk

suap). Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang diketahui pernah menganalisis pengaruh *big data* terhadap pencegahan suap tersebut ialah, penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2015); dan Madhuri et al. (2021). Melalui kedua penelitian tersebut, diketahui bahwa *big data* memang terbukti efektif sebagai *tools* untuk mencegah terjadinya *fraud* (termasuk suap).

Sedikit berbeda dengan variabel *big data*, penelitian yang menganalisis pengaruh *whistle-blowing system* terhadap pencegahan suap diketahui sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Puryati & Febriani (2020); dan Wahyudi et al. (2021). Namun, mengingat efektifnya *whistle-blowing system*, tentunya akan sangat wajar jika variabel tersebut tetap diteliti, terutama jika dilakukan pada lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian terdahulu yang pernah menguji secara bersamaan mengenai pengaruh *whistle-blowing* dan *big data* terhadap pencegahan suap, ternyata juga tergolong masih jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Sehingga akan tepat sekali untuk kembali menganalisis seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pencegahan suap.

Maka dari itu, berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk menganalisis pengaruh dari *big data* terhadap pencegahan suap; dan (2) untuk menganalisis pengaruh dari *whistle-blowing system* terhadap pencegahan suap. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa responden yang ditargetkan dalam penelitian ini ialah auditor-auditor yang bekerja di berbagai lembaga audit negara, yang memang sangat erat dengan berbagai kegiatan mengenai pengujian maupun penyusunan strategi ataupun sistem pencegahan suap di lembaga sektor publik. Adapun auditor yang dimaksud tersebut ialah, auditor-auditor yang diketahui bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Indonesia.

Harapannya, hasil dari penelitian ini, nantinya dapat menjadi solusi sebagai metode maupun strategi, yang dapat menjadi referensi, bahkan dapat diimplementasikan oleh berbagai lembaga sektor publik di Indonesia, dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindakan suap kedepannya di lembaga tersebut.

## **TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Teori keagenan merupakan teori, yang akan menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Menurut Parker et al. (2018); dan Ali (2020), hubungan yang tercipta antara *principal* dan *agent* tersebut dapat terjadi, dikarenakan pihak *principal* atau yang diketahui sebagai pemilik pada suatu organisasi, akan mendelegasikan wewenangnya kepada pihak *agent*, dalam rangka untuk diminta melakukan pengelolaan terhadap organisasi milik *principal* tersebut oleh para *agent*. Namun dalam prosesnya, ternyata para *agent* tidak selalu menjalankan pekerjaannya tersebut dengan benar. Hal ini dikarenakan, di beberapa kasus, ternyata para *agent* tersebut terkadang melakukan berbagai tindakan yang nyatanya sangat merugikan para *principal* seperti tindakan suap, sehingga hal ini kemudian menciptakan konflik antara *principal* dan *agent*. (Anugerah, 2014; dan Bendickson et al., 2016).

Maka dari itu, teori keagenan akan digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik/permasalahan yang terjadi di antara pihak *principal* dengan pihak *agent* tersebut (*agency*

*problem*). Hal ini dilakukan, dalam rangka sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kasus serupa yang merugikan tersebut (seperti suap) tidak terjadi kembali.

Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang telah dilakukan oleh Boyle et al. (2015); Gonzales & Hoffman (2018); dan Wijayanti & Hanafi (2018), ialah beberapa penelitian terdahulu, yang turut dilakukan untuk mendefinisikan keterkaitan *agency theory* dalam rangka untuk mencegah dan memerangi ataupun mendeteksi tindakan *fraud*.

### ***Fraud* dan Penyebabnya**

*Fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan ilegal (melanggar hukum), yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan dari pihak yang menjadi korban atas tindakan tersebut (Desai, 2020; dan Vousinas, 2019). Apabila dilihat secara umum, *fraud* dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu tindakan korupsi, pencurian aset, dan manipulasi laporan keuangan (ACFE, 2020).

Menurut Vousinas (2019) setidaknya terdapat 6 faktor utama yang menjadi faktor penyebab seseorang/pihak melakukan tindakan *fraud*. Keenam faktor tersebut,

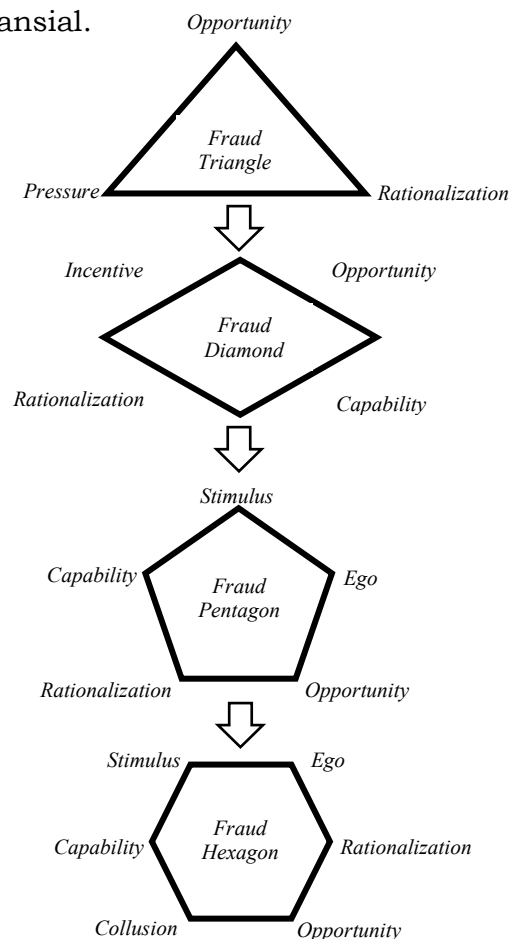
kemudian lebih dikenal dengan istilah *fraud hexagon*. Berdasarkan teori *fraud hexagon*, diketahui bahwa faktor stimulus, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, ego dan kolusi merupakan 6 penyebab utama yang mendorong seseorang melakukan *fraud*. Perlu diketahui bahwa, *fraud hexagon* pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori penyebab *fraud* sebelumnya, yang pernah dijelaskan oleh Cressey (1953) yang mengenalkan *Fraud Triangle*; Wolfe & Hermanson (2004) yang mengenalkan *Fraud Diamond*; dan Crowe (2011) yang kemudian turut mengenalkan *fraud pentagon*. Ilustrasi perkembangan dari teori penyebab *fraud* ini, disajikan pada Gambar 1.

Pada *fraud hexagon*, diketahui terdapat 1 faktor yang telah ditambahkan dari teori penyebab *fraud* sebelumnya. Adapun faktor tambahan yang dimaksud tersebut ialah faktor kolusi (Imtikhani & Sukirman, 2021).

**Definisi Suap (Bribery)**

Suap merupakan salah satu jenis dari tindakan korupsi. Menurut Jain (2020) suap (*bribery*) dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menawarkan dan atau diminta untuk memberikan sesuatu yang dianggap berharga dengan cara yang

ilegal, dalam rangka untuk mempengaruhi atau mengarahkan suatu tugas/tindakan resmi, yang hasilnya dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu menurut Andresen & Button (2019), suap juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menawarkan atau menjanjikan sesuatu; dan atau suatu tindakan untuk meminta atau mendapatkan sesuatu hal, yang tergolong menguntungkan secara finansial.



**Gambar 1. Penyebab *fraud***

**Big Data dan Pencegahan Suap**

Ahmed & Ameen (2017) menjelaskan bahwa *big data* dapat

dimaknai sebagai sekumpulan data yang sangat besar (*volume*), data yang sangat bervariasi jenisnya (*variety*), proses penciptaan data yang sangat cepat (*velocity*), memiliki tingkat keakuratan dan keandalan yang tinggi (*velocity*), dan sekumpulan data yang memiliki nilai-nilai tertentu jika diolah secara tepat (*value*). Melalui besarnya potensi dan keunggulan yang dilihat dari karakteristik *big data* tersebut, maka sangat wajar jika *big data* memiliki banyak peran potensial, yang dapat menyelesaikan berbagai jenis masalah, apabila digunakan secara tepat. Salah satu masalah yang sangat mungkin diselesaikan oleh teknologi tersebut, ialah terkait dengan pencegahan maupun pendeteksian suap (Hipgrave, 2013; Bănărescu, 2015; Madhuri et al., 2021).

Menurut Hipgrave (2013) melalui *big data*, suap sangat mungkin untuk dicegah. Hal ini dikarenakan, *big data* mampu memberikan informasi yang sangat cepat dan komprehensif kepada para eksekutif, mengenai risiko akan terjadinya *fraud* (suap), sebelum kasus tersebut benar-benar akan terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memungkinkan, karena melalui perkembangan teknologi saat ini, jumlah data akan sangat berlimpah (baik dari internal maupun

eksternal, serta data yang terstruktur maupun tidak), dan hal inilah yang kemudian menyebabkan *big data* menjadi sangat efektif. Melalui jejak-jejak digital yang ditinggalkan (atas berbagai kegiatan maupun transaksi), *big data* akan merekam dan memanfaatkannya, untuk kemudian diolah menggunakan *data analytics tool*, dalam rangka untuk menganalisis pola dan tren, serta menangkap tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya suap di suatu instansi (Bănărescu, 2015; Fredriksson et al. (2017); dan Hartono, 2019). Tentu informasi tersebut akan sangat dibutuhkan oleh para eksekutif dari setiap instansi manapun, untuk memanfaatkan *big data*, sebagai alat manajemen risiko (pencegahan), agar jumlah terjadinya kasus suap di instansi tersebut dapat diminimalisir.

Maka berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Big data* berpengaruh positif terhadap pencegahan suap

### **Whistle-blowing System dan Pencegahan Suap**

*Whistle-blowing system* diyakini sangat efektif dan dapat dimaksimalkan oleh instansi manapun, termasuk instansi

pemerintahan, sebagai metode yang dapat digunakan untuk mencegah suap di instansi tersebut (Othman et al., 2015). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Bayunitri (2021) menunjukkan bahwa, *whistle-blowing system* terbukti sebagai metode yang paling efektif untuk mencegah *fraud* (termasuk suap) di suatu instansi. Tingkat keefektifannya diketahui mencapai 54,3%, jika dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini, ternyata juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sow et al. (2018) dan Al-Haidar (2018), yang menunjukkan bahwa *whistle-blowing system* merupakan mekanisme *anti-corruption* yang sangat efektif. Hal ini tak mengherankan, karena dengan adanya *whistle-blowing system*, ternyata mampu menciptakan rasa takut dan enggan bagi para oknum, yang semulanya berniat untuk melakukan tindakan *fraud* (termasuk suap). Hal ini turut dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Suh & Shim (2020), yang menunjukkan banyaknya jumlah kasus *fraud* yang mengalami penurunan di beberapa instansi, semenjak instansi tersebut menerapkan *whistle-blowing system*.

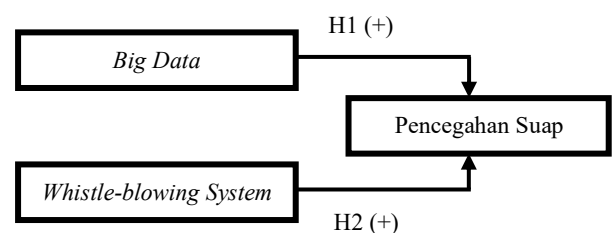
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *whistle-blowing system* merupakan solusi yang efektif sebagai

metode, yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah terjadinya suap di berbagai instansi, terutama pada instansi pemerintahan, yang menjadi instansi dengan jumlah kasus suap tertinggi.

Atas berbagai penjelasan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Whistle-blowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan suap

Berdasarkan berbagai bentuk dari penjelasan sebelumnya, maka dapat ditunjukkan model yang dibangun dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Model Penelitian**

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, ialah metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor-auditor yang bekerja di BPK dan BPKP RI, serta auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Indonesia. Teknik *pusposive sampling* juga digunakan



dalam penelitian ini, dalam rangka untuk menentukan sampel.

Secara total terdapat 191 responden yang telah mengisi secara lengkap kuesioner penelitian ini. Detailnya ialah sebanyak 151 auditor berasal dari BPK. Tepatnya ialah auditor BPK yang bekerja di Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain itu, responden lainnya dari penelitian ini juga berasal dari BPKP. Detailnya ialah sebanyak 26 auditor BPKP yang bekerja di Kantor Perwakilan Provinsi Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta. Sisanya, sebanyak 14 responden lainnya dalam penelitian ini, ialah auditor yang bekerja di berbagai kantor Inspektorat Indonesia seperti dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu variabel *big data* dan *whistle-blowing system*.

Sedangkan variabel dependennya ialah pencegahan suap. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, kuesioner telah digunakan dalam penelitian ini, sebagai alat untuk mengumpulkan data. Setiap item kuesioner dalam penelitian ini, telah diukur menggunakan skala *likert* dengan interval 1-6, yang mana jawaban dengan skala 1-3 menunjukkan persepsi jawaban yang tidak setuju, sedangkan jawaban dengan skala 4-6 menunjukkan hal yang sebaliknya. Adapun detail mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini, akan dianalisis secara simultan melalui aplikasi *partial least square* (PLS). Menurut Latan & Ghozali (2012) dalam PLS, proses analisis data akan dilakukan melalui 2 sub-model pengujian yaitu model pengukuran dan model struktural. Dalam model pengukuran diketahui terdapat 2 tahap pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Sedangkan dalam model struktural terdapat pengujian atas nilai  $r^2$ , *path coefficient* dan uji signifikansi.

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran**

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Referensi
Pencegahan Suap (PS)	Pencegahan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang/pihak tertentu, yang diketahui memberikan dan atau diberikan sesuatu yang dianggap berharga (secara finansial), namun dilakukan dengan cara yang ilegal, dalam rangka untuk mempengaruhi/mengarahkan suatu tugas resmi, yang hasilnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan	6 item	Sow et al. (2018)
Big Data (BD)	Sekumpulan data besar yang memiliki karakteristik utama berupa <i>volume</i> , <i>value</i> , <i>variety</i> , <i>veracity</i> dan <i>velocity</i> (5V), yang mana dalam pengelolaannya membutuhkan teknologi yang sangat canggih.	4 item	Rezaee & Wang (2019)
Whistle-blowing System (WBS)	Wadah yang menerima pelaporan yang dilaporkan seseorang yang melihat secara langsung suatu tindakan <i>fraud</i> ataupun tindakan ilegal lainnya yang terjadi di suatu organisasi	8 item	Noor & Mansor (2019); Sihotang (2018); Suh & Shim (2020)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam model pengukuran akan terdapat 2 tahap pengujian yang harus dilakukan, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas, diketahui juga terdapat 2 jenis tahap pengujian yang dilakukan yaitu uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut Chin (1988), suatu penelitian dapat dikatakan telah memenuhi syarat pengujian validitas konvergen, jika penelitian tersebut memiliki variabel, yang setiap item pertanyaannya mempunyai nilai *loading* yang lebih besar dari 0.5, dengan nilai *average variance expected* (AVE) untuk masing-masing variabelnya juga melebihi dari 0.5. Selain itu Chin

(1988) juga menjelaskan bahwa, untuk memenuhi syarat uji validitas diskriminan, suatu penelitian harus memiliki nilai akar kuadrat AVE atas suatu variabel dengan variabel itu sendiri yang paling tinggi nilainya, jika dibandingkan dengan nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lainnya. Setelah tahap pengujian validitas selesai dilakukan, pengujian lainnya yang dilakukan dalam model pengukuran ialah pengujian reliabilitas. Chin (1988) berpendapat bahwa, suatu penelitian akan dikatakan memenuhi pengujian reliabilitas, jika memiliki nilai *composte reliability* yang melebihi dari 0.7.

Tahapan pengujian lainnya dalam PLS ialah model struktural.

Tahap ini akan dilakukan, setelah analisis dalam model pengukuran selesai dilaksanakan. Dalam model struktural, diketahui bahwa akan terdapat 3 tahap penilaian yang akan dilakukan. Tahap pertamanya ialah pengujian atas nilai  $r^2$  yang dihasilkan. Menurut Latan & Ghazali (2012), pengujian nilai  $r^2$  dalam suatu penelitian, perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut dalam mempengaruhi variabel dependennya. Sehingga nantinya dapat diketahui tingkat kekuatan atas model penelitian yang dibangun tersebut. Lebih lanjut Latan & Ghazali (2012) juga menjelaskan, bahwa nilai  $r^2$  yang dihasilkan, nantinya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok dengan kategori model kuat (0.67), kategori *moderate* (0.33), dan kategori model yang tergolong lemah (0.19).

Tahap lanjutan dalam model pengukuran ialah penilaian *path coefficient* dan uji signifikansi. Kedua pengujian ini akan dilakukan, dalam rangka untuk menilai hipotesis yang telah dibangun dalam sebuah penelitian. Fornell & Larcker (1981); Chin (1988); dan Latan & Ghazali (2012), menjelaskan bahwa dalam tahapan ini, nantinya penilaiannya akan dibagi berdasarkan beberapa

kategori, menyesuaikan *significance level* yang digunakan. Fornell & Larcker (1981); dan Chin (1988) kembali menjelaskan bahwa, terdapat 3 *significance level* yang nantinya dapat dipilih, yaitu 10%, 5% dan 1%. Apabila suatu penelitian menggunakan nilai *significance level* sebesar 10%, maka hipotesis dapat terbukti signifikan jika memiliki nilai *t-value*, yang lebih besar dari 1.65. Selain itu, apabila menggunakan nilai *significance level* sebesar 5%, maka hipotesis akan dianggap signifikan, jika memiliki nilai *t-value* yang lebih tinggi dari 1.96. Terakhir, apabila menggunakan nilai *significance level* sebesar 1%, maka hipotesis dianggap terbukti signifikan, apabila mempunyai nilai *t-value* yang lebih tinggi dari 2.58.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demografi

Secara keseluruhan, total responden dari penelitian ini ialah sebanyak 191 auditor, dengan auditor yang bekerja di BPK RI merupakan responden dengan jumlah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan responden lainnya. Adapun jumlah responden yang berasal dari BPK RI ialah sebanyak 151 responden (presentasi 79%). Adapun sisanya, diketahui ialah auditor yang bekerja di BPKP RI, yaitu sebanyak 26

responden (presentasi 14%); dan responden yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 14 responden (presentasi 7%).

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner, diketahui juga bahwa mayoritas responden yang telah mengisi kuesioner penelitian ini ialah auditor laki-laki, dengan jumlah responden sebanyak 109 orang (presentasi 57%). Selain itu, diketahui juga bahwa, mayoritas responden yang telah mengisi kuesioner penelitian ini, merupakan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana atau yang sederajat, dengan jumlah responden yaitu sebanyak 136 auditor, dengan presentasi mencapai 71%. Terakhir, dapat disimpulkan juga bahwa, responden dari penelitian ini mayoritas ialah responden yang tergolong berpengalaman sebagai auditor (bekerja lebih dari 6 tahun), dengan jumlah mencapai 125 orang, dengan tingkat presentasi sebesar 65%.

### **Pengujian Model Pengukuran**

Secara detail, hasil pengujian model pengukuran dari penelitian ini telah tersaji pada Tabel 2 dan 3. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa terdapat sebuah item

pertanyaan yang masih memiliki nilai *loading* lebih rendah dari 0.5. Item tersebut ialah PS 2, yang merupakan salah satu item pertanyaan dari variabel pencegahan suap. Dikarenakan item tersebut memiliki nilai *loading* yang lebih rendah dari 0.5, maka item tersebut harus dihilangkan (*drop*). Sehingga, semua item pertanyaan yang telah tersaji di dalam Tabel 2 merupakan item-item pertanyaan yang memiliki nilai *loading*, yang lebih besar dari 0.5 (setelah dilakukannya *drop* pada item PS 2). Selain itu dari Tabel 2, juga ditunjukkan bahwa nilai AVE untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini, memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0.5. Maka, berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2, disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat pengujian validitas konvergen.

Setelah uji validitas konvergen, selanjutnya ialah pengujian validitas diskriminan. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3, yang juga menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat dari pengujian validitas diskriminan. Artinya berdasarkan Tabel 2 dan 3, disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat dalam pengujian validitas (baik validitas konvergen maupun validitas diskriminan).

**Tabel 2. Nilai loading dan AVE (Model Pengukuran)**

Variabel	Item	Loading	AVE	Variabel	Item	Loading	AVE	
Whistle-blowing System (WBS)	WBS 1	0,7848	0,6614	Big Data (BD)	BD 1	0,7481	0,5206	
	WBS 2	0,9089			BD 2	0,6677		
	WBS 3	0,9236			BD 3	0,7293		
	WBS 4	0,8398			BD 4	0,7383		
	WBS 5	0,6590		Pencegahan Suap (PS)	PS 1	0,7311		0,6189
	WBS 6	0,6076			PS 3	0,8301		
	WBS 7	0,8498			PS 4	0,8825		
	WBS 8	0,8750			PS 5	0,5639		
			PS 6	0,8799				

**Tabel 3. Nilai CR dan Korelasi Antar Variabel (Model Pengukuran)**

Variabel	CR	BD	PS	WBS
Big Data (BD)	0,8126	<b>0,7215</b>	0	0
Pencegahan Suap (PS)	0,8880	0,4837	<b>0,7867</b>	0
Whistle-blowing System (WBS)	0,9388	0,4842	0,7796	<b>0,8133</b>

Catatan: angka yang tercetak tebal ialah nilai akar kuadrat dari nilai AVE setiap variabel

**Tabel 4. Hasil Pengujian Model Struktural**

Path	Path Coefficient	T-Value	Kesimpulan
H1 BD -> PS	0,1388	5,7617	Didukung
H2 WBS -> PS	0,7124	28,1219	Didukung
$R^2$ 0,6225			

### Pengujian Model Struktural

Hasil dari pengujian model struktural dalam penelitian ini, telah disajikan pada Tabel 4. Melalui Tabel 4 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai  $r^2$  dalam penelitian ini ialah sebesar 0,6225, yang artinya bahwa *big data* dan *whistle-blowing system* (variabel independen) telah mempengaruhi variabel pencegahan suap (variabel dependen) sebesar 62,25%. Adapun sisanya, sebesar 37,75% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Selain menunjukkan hasil dari nilai  $r^2$ , pada Tabel 4 juga tersaji hasil uji signifikansi dalam penelitian ini. Melalui Tabel 4, dapat disimpulkan

bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini telah didukung oleh data, karena semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti memiliki nilai *path coefficient* yang positif, dan memiliki nilai *t-value* lebih dari 1.96. Sehingga, disimpulkan bahwa: (1) *Big data* terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap; dan (2) *Whistle-blowing system* terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap.

### Pembahasan

Tujuan telah dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana pengaruh

*big data* dan *whistle-blowing system* terhadap pencegahan suap. Berdasarkan hasil pengujian statistik dalam penelitian ini, diketahui bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini telah didukung oleh data. Artinya bahwa, baik *big data* maupun *whistle-blowing system* memang telah terbukti efektif sebagai metode yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suap.

Menurut Chen et al. (2015); dan Kılıç (2020) *big data* dapat dimaknai maupun didefinisikan sebagai sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tidak terstruktur, yang dalam pengelolaan/pemrosesannya tidak dapat dilakukan dengan cara yang tradisional. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui juga bahwa pada dasarnya *big data* memiliki 5 karakteristik utama, yang kemudian menjadikan teknologi ini menjadi sangat berharga. Kelima karakteristik tersebut ialah *volume*, *variety*, *value*, *veracity* dan *velocity* (Jha et al., 2020). Melihat besarnya potensi dari teknologi tersebut, tidak mengherankan jika saat ini, telah banyak pihak yang mulai melirik untuk menggunakan *big data* dengan beragam tujuan. Mengingat, di kondisi saat ini, dengan melimpahnya ketersediaan data dan transaksi yang berbentuk digital (terutama data

eksternal, seperti data yang diperoleh dari *website*, *blog* hingga media sosial), akan membuat *big data* semakin efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, seperti tindakan suap (*fraud*). Bănărescu (2015); Chen et al. (2015) Balasupramanian et al. (2018); dan Jha et al. (2020); adalah beberapa peneliti/penulis terdahulu, yang turut menunjukkan besarnya potensi *big data*, yang ternyata dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* (termasuk suap). Menurut Balasupramanian et al. (2018); dan Bănărescu (2015) salah satu faktor utama yang kemudian menjadikan *big data* sangat ampuh untuk mencegah terjadinya *fraud*, dikarenakan teknologi tersebut juga mampu mengolah data yang tidak terstruktur dan data yang jumlahnya sangat besar dalam waktu yang singkat. Kemampuan tersebut, tentunya mampu menjadikan *big data* dengan sangat mudah menangkap dan mengidentifikasi berbagai aktivitas yang tampak mencurigakan (*hidden patern*). Sehingga wajar sekali, jika survei yang pernah dilakukan oleh Ernst & Young (2014), turut menunjukkan banyaknya pihak menyetujui dan mengakui (mencapai 72% dari total 466 perusahaan yang disurvei) bahwa *big data* sangat ampuh dan efektif sebagai alat untuk

mencegah berbagai jenis tindakan *fraud* (termasuk suap). Hasil tersebut, ternyata juga diperkuat berdasarkan hasil dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, juga dibuktikan bahwa *big data* ternyata memang berpengaruh positif terhadap pencegahan suap. Sehingga, dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa, *big data* merupakan bentuk solusi yang efektif atas kemungkinan munculnya *agency problem* di suatu instansi (dalam kasus ini ialah suap). Harapannya, hasil dari penelitian ini, nantinya dapat semakin mendorong berbagai instansi, terutama instansi pemerintah, untuk segera menggunakan *big data* dalam rangka untuk mencegah terjadinya suap pada instansi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum digunakannya teknologi ini. Selain karena biaya investasi yang dibutuhkan tidak murah, hal lainnya yang harus diperhatikan ialah berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari data yang akan menjadi *input* dari teknologi *big data* tersebut. Jelas, jika secara kuantitas dan kualitas *input* nya buruk, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan maksimal. Bahkan akan menyesatkan.

Fuller & Shawver (2020) menjelaskan bahwa *whistle-blowing*

dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pelaporan/pengungkapan, yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi atas tindakan ilegal maupun *immoral* yang dilihatnya, kepada pihak yang berwenang, yang diketahui mampu mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi perbuatan ilegal tersebut. Menurut Suh & Shim (2020), ternyata keberadaan dari *whistle-blowing system* di suatu instansi, mampu mengurangi jumlah terjadinya kasus *fraud* di instansi tersebut. Adanya penurunan kasus tersebut, sangat masuk akal. Hal ini dikarenakan, dengan adanya *whistle-blowing system*, ternyata dapat memberikan efek rasa ketakutan yang dirasakan para pelaku ketika akan melakukan tindakan *fraud* (termasuk suap). Mereka akan selalu merasa di awasi oleh banyak pihak (anggota organisasi itu sendiri) setiap akan melakukan perbuatan ilegal tersebut (Agusyani et al. 2016); dan Wahyudi et al. 2021). Sehingga, sangat wajar, jika hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hal yang sama. Artinya *whistleblowing system* kembali terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap. Sehingga, melalui penelitian ini, kembali ditunjukkan adanya solusi efektif lainnya atas kemungkinan munculnya *agency problem* yang terjadi di suatu instansi, jika masalah

yang terjadi berkaitan dengan suap. Selain itu, berdasarkan hasil dari penelitian ini, juga diharapkan dapat semakin mendorong berbagai pihak instansi, utamanya instansi pemerintahan untuk segera menerapkan *whistle-blowing system*. Akan tetapi, sebelum diterapkannya *whistle-blowing system* di suatu instansi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar metode tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Hal tersebut berkaitan dengan komitmen dari instansi terkait, agar turut membuat suatu kebijakan dan aturan, yang dapat melindungi para *whistle-blower* dari berbagai risiko yang ditimbulkan ketika menjadi pelapor. Bahkan kebijakan tersebut harus dibuat, sebelum diresmikannya *whistle-blowing system* di instansi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting, karena jika kebijakan perlindungan tersebut tidak ada, akan membuat banyak anggota organisasi enggan untuk menjadi *whistle-blower*. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kepastian perlindungan tersebut, akan banyak para *whistle-blower* yang akan memperoleh berbagai tindakan atau perlakuan yang sangat buruk dari sesama rekan kerjanya (dikucilkan), bahkan oleh atasannya sendiri. Mereka (*whistle-blower*) biasanya akan disebut sebagai seorang pengkhianat. Kondisi

semakin diperburuk, karena para *whistle-blower* biasanya juga akan menerima berbagai tindakan balas dendam yang dilakukan oleh pelaku *fraud* tersebut. Bahkan di beberapa kasus, banyak juga *whistle-blower* yang harus kehilangan pekerjaannya, setelah melakukan tindakan pelaporan tersebut (Elias, 2008; Shonhadji & Maulidi, 2021). Maka dari itu, dapat disimpulkan juga bahwa, penerapan *whistle-blowing system*, juga harus diiringi dengan pembuatan kebijakan/aturan perlindungan yang diperlukan oleh para *whistle-blower*. Melalui kebijakan tersebut, akan sangat diyakini bahwa, *whistle-blowing system* akan menjadi sangat ampuh sebagai metode untuk mencegah terjadinya suap.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh dari *big data* maupun *whistle-blowing system* terhadap pencegahan suap. Adapun responden penelitian ini diketahui ialah 191 auditor yang bekerja di BPK dan BPKP RI, serta auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintahan Indonesia.

Hasil dari penelitian ini telah membuktikan bahwa, baik *big data* maupun *whistle-blowing system* telah



terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap. Maka dari itu, harapannya penelitian ini, dapat dijadikan referensi tambahan kedepannya oleh berbagai instansi, terutama instansi pemerintah, untuk mulai menggunakan atau mengaplikasikan teknologi *big data* dan *whistle-blowing system* pada instansi tersebut, dalam rangka untuk mencegah suap. Memang tidak akan mudah dan murah, terlebih untuk berinvestasi pada teknologi seperti *big data*. Namun, apabila mengingat efektifnya teknologi tersebut untuk mencegah tindakan suap maupun *fraud* lainnya, maka investasi tersebut dirasa tidak akan merugikan sama sekali, bahkan manfaatnya akan sangat terasa, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang (bersifat jangka panjang). Selain itu, kepada instansi Pemerintah yang memang sudah memiliki *whistle-blowing system* dan atau memang belum memiliki, agar dalam penggunaan metode tersebut kedepannya, harus diiringi dengan peraturan atau kebijakan, yang dapat melindungi para *whistle-blower*. Hal ini dilakukan agar fungsi dari *whistle-blowing system* dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat efektif sebagai metode yang mampu mencegah terjadinya suap.

Keterbatasan dari penelitian ini ialah terkait dengan penyebaran kuesioner. Tentu, penyebarannya akan menjadi lebih maksimal dan cepat untuk pengisiannya, jika pandemi *covid-19* tidak terjadi. Adapun saran kedepannya, terutama kepada peneliti/akademisi yang berminat melakukan penelitian serupa, untuk menambahkan variabel potensial lainnya seperti variabel religiusitas dan spiritualitas.

## REFERENSI

- ACFE. (2020). *2020 Report to The Nations*. <https://acfe-public.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf>
- Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Ahmed, W., & Ameen, K. (2017). Defining Big Data and Measuring Its Associated Trends in the Field of Information and Library Management. *Library Hi Tech News*, 9, 21–24.
- Al-Haidar, F. (2018). Whistleblowing in Kuwait and

- UK Against Corruption and Misconduct. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 1020–1033.
- Ali, C. Ben. (2020). Agency Theory and Fraud. In H. K. Baker, L. Purda-Heeler, & S. Saadi (Eds.), *Corporate Fraud Exposed* (pp. 149–167). Emerald Group Publishing Limited.
- Andresen, M. S., & Button, M. (2019). The Profile and Detection of Bribery in Norway and England & Wales: A Comparative Study. *European Journal of Criminology*, 16(1), 1–23.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Balasupramanian, N., Ephrem, B. G., & Al-Barwani, I. S. (2018). User Pattern Based Online Fraud Detection and Prevention using Big Data Analytics and Self Organizing Maps. *2017 International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICT)*, 691–694.
- Bănărescu, A. (2015). Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 1827–1836.
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: the times, they are a-changin'. *Management Decision*, 54(1), 174–193.
- Boyle, D. M., DeZoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2015). The Effect of Alternative Fraud Model Use on Auditor's Fraud Risk Judgments. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(6), 578–596.
- Chen, J., Tao, Y., Wang, H., & Chen, T. (2015). Big Data Based Fraud Risk Management at Alibaba. *The Journal of Finance and Data Science*, 1(1), 1–10.
- Chin, W. W. (1988). *The Partial Least Square Approach for Structural Equation Modeling*. in G.A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. FreePress.
- Crowe, H. (2011). Why the Fraud Triangle is no Longer Enough. In *Horwath, Crowe LLP*.
- Desai, N. (2020). Understanding the Theoretical Underpinnings of Corporate Fraud. *The Journal for Decision Makers*, 45(1), 22–31.
- Elias, R. Z. (2008). Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294.
- Ernst & Young. (2014). *Global EY FIDS Forensic Data Analytics*

- Survey 2014: Big Risks Require Big Data Thinking*. 2014 EYGM Limited, SCORE no. DQ0037.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Francis, R. D., & Armstrong, A. (2011). Corruption and Whistleblowing in International Humanitarian Aid Agencies. *Journal of Financial Crime*, 18(4), 319–335.
- Fredriksson, C., Mubarak, F., Tuohimaa, M., & Zhan, M. (2017). Big Data in The Public Sector: A Systematic Literature Review. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 21(3), 39–61.
- Fuller, L. R., & Shawver, T. J. (2020). Will Cognitive Style Impact Whistleblowing Intentions? In *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (Vol. 23, pp. 47–62). Emerald Publishing Limited.
- Gonzales, G. C., & Hoffman, V. B. (2018). Continuous Auditing's Effectiveness as a Fraud Deterrent. *AUDITING: A Journal of Practice and Theory*, 37(2), 225–247.
- Hartono, J. (2019). *Kajian Topik-Topik Mutakhir dan Agenda Riset ke Depan* (1st ed.). Penerbit Andi.
- Hipgrave, S. (2013). Smarter Fraud Investigations with Big Data Analytics. *Network Security*, 12, 7–9.
- Intikhani, L., & Sukirman. (2021). Determinan Fraudulent Financial Statemen melalui Perpektif Fraud Hexagon Theory pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 2541–5204.
- Jain, R. (2020). Bribery and Firm Performance in India: A Political Economy Perspective. *Journal of Asian Economics*, 68, 1–13.
- Jha, B. K., Sivasankari, G. G., & Venugopal, K. R. (2020). Fraud Detection and Prevention by Using Big Data Analytics. *Proceedings of the 4th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC) 2020*, 267–274.
- Johansson, E., & Carey, P. (2016). Detecting Fraud: The Role of the Anonymous Reporting Channel. *Journal Business Ethics*, 139, 391–409.
- Kılıç, B. İ. (2020). The Effect of Big Data on Forensic Accounting Practices and Education. In S. Grima, E. Boztepe, & P. J. Baldacchino (Eds.), *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis* (Vol. 102, pp. 11–26). Emerald Publishing Limited.
- Kompas. (2020). *Catatan ICW, Tren Penindakan Korupsi Turun 271 Kasus*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/16532131/catatan-icw-tren-penindakan-korupsi-turun-jadi-271-kasus>

- Kompas. (2021a). *Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun*. Kompas.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>
- Kompas. (2021b). *ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun*. Kompas.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>
- KPK. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3* (P. P. Harto (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Madhuri, S. T., Babu, R. E., Uma, B., & Lakshmi, M. B. (2021). Big-Data Driven Approaches in Materials Science for Real-Time Detection and Prevention of Fraud. *Materials Today: Proceedings*, 2–9.
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294.
- Noor, N. R. A. M., & Mansor, N. (2019). Exploring the Adaptation of Artificial Intelligence in Whistleblowing Practice of the Internal Auditors in Malaysia. *Procedia Computer Science*, 163, 434–439.
- Othman, R., Aris, N. A., Mardiyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in The Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28, 59–67.
- Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., & Zeppetella, L. (2018). Agency Theory Perspective on Public-Private-Partnerships: International Development Project. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 239–259.
- Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control Toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(3), 35–48.
- Rezaee, Z., & Wang, J. (2019). Relevance of Big Data to Forensic Accounting Practice and Education. *Managerial Auditing Journal*, 34(3), 268–288.
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The Roles of

- Whistleblowing System and Fraud Awareness as Financial Statement Fraud Deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(3), 370–389.
- Sihotang, A. R. (2018). *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud pada Universitas Sriwijaya*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Rasid, S. Z. A. (2018). Fraud Prevention in Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517.
- Suh, J. B., & Shim, H. S. (2020). The Effect of Ethical Corporate Culture on Anti-Fraud Strategies in South Korean Financial Companies: Mediation of Whistleblowing and A Sectoral Comparison Approach in Depository Institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 60, 1–12.
- Tang, J., & Karim, K. E. (2019). Financial Fraud Detection and Big Data Analytics – Implications on Auditors' Use of Fraud Brainstorming Session. *Managerial Auditing Journal*, 34(3), 324–337.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village Apparatus Competence, Individual Morality, Internal Control System and Whistleblowing System on Village Fund Fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

## [JIA] Submission Acknowledgement



Made Aristia Prayudi <ejournal@undiksha.ac.id>

Jum 19/11/2021 21:11



Kepada: Briyan Efflin Syahputra

Briyan Efflin Syahputra:

Thank you for submitting the manuscript, "Pencegahan Suap di Lembaga Pemerintahan: Peran Big Data dan Whistle-blowing System" to JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/author/submission/41356>

Username: briyanefflin

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Made Aristia Prayudi

JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)

JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)

<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA>

[Balas](#) | [Teruskan](#)

Accredited grade 2 by Kemendiknas/BKIP  
Decree (SK) No. 149/U/EP/2020

# JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)

Published by:

p-ISSN: 2527-4090 e-ISSN: 2528-1399

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS PUBLICATION ETHICS

Home > User > Author > Submissions > #41356 > Summary

## #41356 Summary

**SUMMARY** REVIEW EDITING

### Submission

Authors	Briyan Efflin Syahputra, Anggit Esti Irawati
Title	Pencegahan Suap di Lembaga Pemerintahan: Peran Big Data dan Whistle-blowing System
Original file	41356-101446-7-SM.DOC 2021-11-19
Supp. files	<a href="#">ADD A SUPPLEMENTARY FILE</a>
Submitter	Briyan Efflin Syahputra
Date submitted	November 19, 2021 - 09:11 PM
Section	Artikel
Editor	None assigned

### Status

Status	Awaiting assignment
Initiated	2021-11-19
Last modified	2021-11-19

#### QUICK MENU

- Author Fees
- Online Submission
- Focus and Scope
- Author Guidelines
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Contact

SINTA Accreditation Certificate

Daftar capaian Luaran Tambahan belum diisi:

1. Artikel di jurnal internasional, target: Accepted

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Nusa Indah Gg. Nakula No.6 RT 01 RW 14, Dero, Condongcatur, Depok,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55283

N a m a : Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Banteran RT 02 RW 06, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah - 53176

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : Laporan Penelitian  
Berjudul : Strategi Efektif untuk Mencegah Suap pada Lembaga Sektor Publik
  - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



15 Agustus 2022



1. Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak
2. Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si

Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

## ABSTRAK

### LAPORAN PENELITIAN: STRATEGI EFEKTIF UNTUK MENCEGAH SUAP PADA LEMBAGA SEKTOR PUBLIK

Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak  
Anggit Esti Irawati, S.E., M.Ak  
Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta  
briyan.efflin@staff.uty.ac.id  
anggitestira@staff.uty.ac.id

Menerapkan strategi pencegahan suap yang efektif merupakan langkah yang tepat bagi lembaga sektor publik yang berkomitmen untuk memerangi dan menurunkan angka kasus suap kedepannya. Mengingat kasus suap merupakan salah satu jenis kasus korupsi yang paling banyak terjadi setiap tahunnya pada lembaga sektor publik di berbagai negara, termasuk salah satunya ialah Indonesia. Sehingga pencarian mengenai berbagai faktor yang dapat mendukung proses pencegahan tindakan suap masih menjadi hal yang diutamakan oleh banyak pihak. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *big data*, *whistle-blowing system* dan spritualitas terhadap pencegahan suap. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi terbaru bagi pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menjalankan strategi yang efektif dan komprehensif dalam rangka mencegah terjadinya kasus suap kedepannya. Sehingga harapannya kasus suap yang terjadi di pemerintah Indonesia dapat diminimalisir jumlahnya. Tentunya hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi utama bagi para peneliti/akademisi yang tertarik mengenai strategi yang efektif untuk mencegah tindakan suap.

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner (metode survei) pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta auditor internal yang bekerja di Kantor Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Pengujian statistik dari hasil penyebaran kuesioner dari penelitian ini berupa *simultaneous equation model* (SEM), yang dibantu oleh aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa baik *big data*, *whistle-blowing* maupun spritualitas terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan suap

**Kata Kunci:** *Big Data*, *Whistle-blowing*, *Spiritualitas*, *Suap*

**Tanggal pertama di publikasi** : 15 November 2021  
**Dipublikasikan** : Yogyakarta  
**KTP** : 1701031404940001 (Briyan Efflin Syahputra)  
3302027008940001 (Anggit Esti Irawati)

#### Alamat

Briyan Efflin Syahputra : Jln. Nusa Indah Gg. Nakula No.6 RT 01 RW 14, Dero,  
Condongcatur, Depok, Sleman, DIY - 55283  
Anggit Esti Irawati : Banteran RT 02 RW 06, Wangon, Banyumas, Jawa  
Tengah – 53176

0812-4305-379 Briyan

0822-2018-3509 Anggit

## HASIL PENILAIAN SEJAWAT ATAU PEER REVIEW

### KARYA ILMIAH HAK CIPTA / SINEMATOGRAFI

Bentuk Hak Cipta : Laporan Penelitian  
 Judul / Nama Karya : Strategi Efektif Untuk Mencegah Suap Pada Lembaga Sektor Publik  
 Nama Penemu : Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.  
 Status Penemu : Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si.  
 Identitas HaKI : ~~Mandiri~~/Berkelompok/Kelembagaan (pilih satu)  
 a. Jenis : Laporan Penelitian  
 b. Nomor Pendaftaran : EC00202254028  
 c. Nomor Pencatatan : 000369761  
 d. Tahun Terbit : 16 Agustus 2022  
 e. Kategori HAKI :  
 Beri Tanda  pada kategori sesuai

Paten Granted  
 Pendaftaran Paten  
 Hak Cipta

#### Hasil Penilaian Peer Review

Komponen Nilai	Nilai Maksimal HAKI		Hasil Akhir yang diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan Unsur Isi (10%)		1.5	1,0
b. Ruang Lingkup dan Kedalaman (30%)		4.5	4,0
c. Kecukupan dan Kemuktahiran data/Informasi dan Metodologi (30%)		4.5	4,0
d. Kelengkapan Unsur dan Kualitas (30%)		4.5	4,0
<b>Total= (100 %)</b>		15	13
<b>Kontribusi Penulis (Pengusul Kedua dari Dua) 40%</b>			7,8

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Reviewer 1



Digitally signed by Lilis  
 Endang Wijayanti, M.Si., Akt.  
 Date: 2022.12.07 06:31:51  
 +07'00'

Dra. Lilis Endang Wijayanti, M.Si., Ak. CA.

NIK. 110692009

Pangkat/Golongan : Pembina/IVa

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 400 Ak

Unit Kerja : Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Universitas Teknologi Yogyakarta

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH HAK CIPTA / SINEMATOGRAFI**

Bentuk Hak Cipta : Laporan Penelitian  
 Judul / Nama Karya : Strategi Efektif Untuk Mencegah Suap Pada Lembaga Sektor Publik  
 Nama Penemu : Briyan Efflin Syahputra, S.E., M.Ak.  
 Status Penemu : Anggit Esti Irawati, S.E., M.Si.  
 Identitas HaKI : **Mandiri/Berkelempok/Kelembagaan** (pilih satu)  
 a. Jenis : Laporan Penelitian  
 b. Nomor Pendaftaran : EC00202254028  
 c. Nomor Pencatatan : 000369761  
 d. Tahun Terbit : 16 Agustus 2022  
 e. Kategori HAKI  
 Beri Tanda  $\checkmark$  pada kategori sesuai

Paten Granted  
 Pendaftaran Paten  
 Hak Cipta

**Hasil Penilaian Peer Review**

Komponen Nilai	Nilai Maksimal HAKI		Hasil Akhir yang diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan Unsur Isi (10%)		1.5	1,5
b. Ruang Lingkup dan Kedalaman (30%)		4.5	4
c. Kecukupan dan Kemuktahiran data/Informasi dan Metodologi (30%)		4.5	3,5
d. Kelengkapan Unsur dan Kualitas (30%)		4.5	4
<b>Total= (100 %)</b>		15	13
<b>Kontribusi Penulis (Pengusul Kedua dari Dua) 40%</b>			5,2

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Reviewer 2

Dr. Surifah, M.Si.

NIK. 100917030

Pangkat/Golongan : Pembina/IVa

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 550 Ak

Unit Kerja : Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Universitas Teknologi Yogyakarta